

Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Cibeureum Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat

Mayumi Getzemani Itshua Palili¹, Ratna Indriasari², Definitif Endrina Kartini Mendrofa³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara

e-mail: Mayumiitshua98@gmail.com¹, ratna.indriasari@stipan.ac.id²,
definitif.mendrofa@stipan.ac.id³

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Cibeureum Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Teknik Pengumpulan Data dilakukan melalui Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Teknik Analisis Data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, Efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Cibeureum, belum tercapai secara optimal. Meskipun begitu, program ini sudah berjalan dengan baik oleh pemerintah karena sudah banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari Bantuan Sosial PKH. *Kedua*, faktor pendukung efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial PKH yaitu: tersedia aplikasi dari Pemerintah yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG), adanya operator desa dan pendamping PKH untuk membantu pengawasan dalam pengusulan bantuan mulai dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Calon Keluarga Penerima Manfaat. Faktor Penghambatnya adalah kurangnya informasi sehingga penerima bantuan PKH kurang tepat sasaran. *Ketiga*, Upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Cibeureum, pemerintah desa dan pendamping PKH mengadakan sosialisasi agar uang tunai bantuan PKH digunakan dengan baik sesuai komponen dan memberikan pelatihan cara berdagang agar uang tunai yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak habis begitu saja, melainkan dikelola agar bisa menambah penghasilan, kemudian pendamping PKH membuat laporan bulanan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar data yang dihasilkan lebih akurat.

Kata Kunci: Efektivitas, Program Keluarga Harapan (PKH), Kesejahteraan Masyarakat.

Abstract

The purpose of this study was to determine and describe the effectiveness of the implementation of the Family Hope Program (PKH) social assistance program in improving community welfare in Cibeureum Village, Cisarua District, Bogor Regency, West Java Province. This research method uses qualitative methods and descriptive approaches. Data collection techniques are carried out through interviews, observations, and documentation. Data analysis techniques used were data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that first, the effectiveness of the implementation of the PKH social assistance program in improving community welfare in Cibeureum Village has

not been achieved optimally. Even so, this program has been running well by the government because many people have benefited from PKH Social Assistance. Second, the supporting factors for the effectiveness of the implementation of the PKH social assistance program are: available applications from the Government, namely the Integrated Social Welfare Data (DTKS) and the Social Welfare Information System-Next Generation (SIKS-NG), the existence of village operators and PKH assistants to assist supervision in proposing assistance starting from Beneficiary Families (KPM) and Prospective Beneficiary Families. The inhibiting factor is the lack of information so that PKH beneficiaries are less targeted. Third, Efforts to improve the effectiveness of the implementation of the PKH social assistance program in improving community welfare in Cibeureum Village, the village government and PKH assistants conduct socialization so that PKH cash assistance is used properly according to the components and provide training on how to trade so that the cash received by Beneficiary Families (KPM) does not just run out, but is managed so that it can increase income, then PKH assistants make monthly reports on Beneficiary Families (KPM) so that the data generated is more accurate.

Keywords: *Effectiveness, Family Hope Program (PKH), Community Welfare.*

PENDAHULUAN

Dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial yang dimaksud adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Tetapi kenyataannya masyarakat di Indonesia belum merasakan arti kesejahteraan sosial yang sebenarnya dikarenakan kemiskinan yang masih menjadi masalah utama bagi pemerintah bahkan masyarakat Indonesia. Kemiskinan adalah keadaan dimana seseorang atau kelompok tidak mampu atau kurang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, papan, Kesehatan, dan Pendidikan.

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus penyempurnaan kebijakan di bidang perlindungan sosial, pemerintah Indonesia menyelenggarakan Program Keluarga Harapan (PKH), program ini adalah salah satu Program Bantuan Sosial yang diluncurkan oleh Pemerintah. Program Keluarga Harapan (PKH) lebih dimaksudkan kepada upaya untuk membangun sistem perlindungan masyarakat miskin.

Sesuai, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Adapun besaran anggaran yang akan digelontorkan Kemensos untuk bansos Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2022 menurut Detik.com sebesar Rp28,7 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Nantinya dana ini akan dibagi-bagikan kepada para penerima manfaat sepanjang 2022.

Dengan demikian, untuk tercapainya efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), penelitian ini menggunakan teori S.P Siagian (Siagian, S. P., 2018, p. 77) bahwa ada beberapa kriteria ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, dapat dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini ditujukan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai;
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi;
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, terkait dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional;

- d. Perencanaan yang matang, pada hakikatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan;
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja;
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi;
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai tujuannya;
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Selain itu, Silalahi Ulbert menyatakan bahwa dalam konteks mencapai tujuan, maka efektivitas berarti *doing the right things* atau mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas menunjukkan pada keberhasilan pencapaian sasaran organisasional, sehingga efektivitas digambarkan sebagai satu ukuran apakah manajer mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas didefinisikan sebagai sejauh mana sebuah organisasi mewujudkan tujuan-tujuannya. Keefektifan organisasional adalah tentang *doing everything you know to do and doing it well*. (Silalahi, 2015, pp. 416 - 417)

Seperti kita ketahui bahwa Desa mempunyai kuota untuk penerimaan bantuan sosial program keluarga harapan ini, salah satu desa yang mendapatkan kuota alokasi dana bantuan Program Keluarga Harapan tersebut adalah Desa Cibeureum Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor. Desa cibeureum adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dengan luas wilayah 1.128,62 Ha.

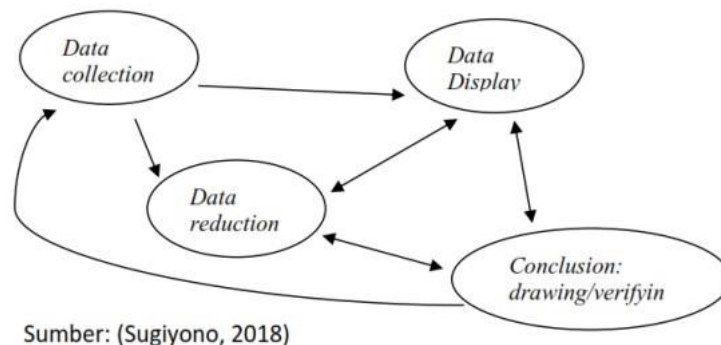
Berdasarkan masalah yang ada di latar belakang diatas penulis memilih untuk mengambil dan menetapkan judul “Efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Cibeureum Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor”. Berdasarkan latar belakang diatas, maka pertanyaan penelitian yang akan dibahas, yaitu : **Pertama**, Bagaimana efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Cibeureum Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat?, **Kedua**, Apa faktor pendukung dan penghambat efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Cibeureum Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat?, **Ketiga**, Bagaimana upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Cibeureum Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat?

METODE

Menurut sugiyono menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. (Sugiyono, 2018, p. 18)

Kemudian,peneliti melaksanakan teknik pengumpulan data sebagai langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian sendiri adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), wawancara (interview), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya. (Sugiyono, 2018, p. 296)

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan peneliti sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2018: 321) mengatakan “aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*”



Gambar 3.1 Komponen Dalam Analisis Data (*Interactive Model*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Desa Cibeureum terdapat 5.546 masyarakat tidak mampu atau keluarga miskin yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Menurut 5 Komponen Program Keluarga Harapan (PKH), didalam DTKS terdapat 360 ibu hamil, 1.059 jiwa balita, 1.988 jiwa anak sekolah, 37 jiwa lanjut usia, dan 15 jiwa penyandang disabilitas.

Menurut operator desa dalam wawancara, dari jumlah masyarakat tidak mampu di atas jumlah calon penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang diusulkan ialah ±700 Calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM), jika dilihat dari 5 komponen dan kriteria miskin menurut kementerian sosial jumlah di atas adalah jumlah yang seharusnya mendapatkan Bantuan Sosial PKH, namun kenyataannya jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di desa cibeureum tahap 1 tahun 2023 adalah 278 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dari 278 KPM tersebut ada 8 ibu hamil, 80 balita, 443 anak sekolah, 35 lanjut usia, dan 2 penyandang disabilitas dan 101 anak pra sekolah (APRAS). Data bayar tahap 4 tahun 2022 dan data bayar tahap 1 tahun 2023 jumlah KPM-nya berbeda, tahap 4 tahun 2021 berjumlah 295 KPM sedangkan tahap 1 tahun 2023 berjumlah 278 KPM. Perubahan ini terjadi karena adanya perubahan atau perkembangan sosial ekonomi yang ada di kalangan KPM yang dilihat oleh pemerintah baik itu Operator Desa, Pendamping PKH, Dinas Sosial, dan juga Kementerian Sosial, juga adanya perubahan data masyarakat yang diusulkan oleh operator desa.

Desa Cibeureum juga mempunyai 1 Operator desa yaitu bapak Lutfi yang bertugas untuk menginput data salah satunya adalah (SIKS-NG) aplikasi ini berguna untuk mengajukan nama masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial dan menginput nama masyarakat tidak mampu ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) ada dua jenis offline dan online, kedua aplikasi ini fungsinya sama saja tetapi cara penginputannya beda jika offline penginputannya bisa kapan saja tetapi agak repot dikarenakan yang bersangkutan harus datang ke kecamatan membawa kartu keluarga, surat keterangan tidak mampu dari desa, dan kuesioner yang telah di isi di desa, untuk mengambil tanda tangan sebagai persetujuan mengetahui dan masyarakat yang bersangkutan harus ke dinas sosial untuk mengumpulkan berkas tersebut sebagai pengajuan nama sedangkan untuk online penginputan nama hanya bisa di tanggal 15-25, data yang dimaksud ialah data kuesioner, kartu keluarga, dan foto rumah, setelah tanggal 25 data yang telah diinput bisa langsung dikirim ke dinas sosial melalui finalisasi. Tugas operator desa hanya sampai di situ, lalu dilanjutkan oleh pendamping PKH.

Di desa Cibeureum terdapat 1 Pendamping PKH yang bertugas untuk mendampingi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Pendamping PKH bernama ibu Susi Rosmala mendampingi tiga desa di kecamatan Cisarua yaitu Desa Kopo, Desa Jogjogan dan Desa Cibeureum. Ibu Susi Rosmala mendapatkan informasi lowongan untuk pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dari teman yang sudah lebih dahulu menjadi pendamping PKH, lalu membuat lamaran kerja kepada pemerintah daerah setelah itu menunggu pengumuman lolos seleksi tahap tes administrasi panggilan untuk melakukan tes pengetahuan umum dan selanjutnya tes interview di pemerintah daerah di Gedung Tegar Beriman, saat lolos seleksi di semua tes dinyatakan lulus dan ditempatkan di wilayah kerja (sesuai domisili).

Alur pelaksanaan PKH yang ada di Desa Cibeureum ialah masyarakat yang masuk kedalam data terpadu kesejahteraan sosial bisa diusulkan menjadi calon penerima bantuan sosial, operator desa mengusulkan nama masyarakat yang tidak mampu, yang masuk kedalam salah satu dari 5 komponen PKH ke dinas sosial untuk difinalisasi kelayakannya untuk mendapat bantuan sosial yang mana, namun sebelum itu masyarakat harus memperhatikan data diri agar semua data kependudukan sudah sinkron dengan data lainnya. Untuk yang terpilih menjadi calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dinas sosial mengirimkan nama yang telah difinalisasi kepada pendamping untuk memvalidasi memverifikasi kelayakan atau mendata ulang kelayakannya secara door to door agar lebih tepat sasaran, melakukan tanya jawab langsung yang basicnya seperti pendataan Badan Pusat Statistik (BPS), meminta data Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, foto rumah dan foto calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM), lalu dikirimkan langsung ke kementerian sosial melalui aplikasi SIKS Mobile secara online, lalu di seleksi lagi oleh kementerian sosial kelayakannya, yang terpilih datanya akan dikirimkan ke pendamping dan juga ada surat undangan untuk setiap KPM dari Kementerian Sosial, Pendamping mengkoordinasi ke setiap desa dan kecamatan, agar tiap Rw dari desa menyebar undangan ke tiap KPM, KPM di undang ke desa untuk mendengarkan arahan dari pemerintah desa. Namun menurut keterangan ibu susi sebagai pendamping kadang ada juga nama yang tidak diusulkan, menjadi penerima. Yang telah ditetapkan menjadi penerima atau KPM PKH akan menerima bantuan sosial yang dicairkan langsung oleh KPM yang bersangkutan di link ATM terdekat/ kantor pos. Uang tunai tersebut akan langsung dikirimkan oleh kementerian sosial ke dalam ATM PKH setiap KPM, tanpa perantara.

Masyarakat yang terpilih menjadi KPM akan menerima uang tunai setiap per-tiga bulan sekali, namun untuk Desa Cibeureum biasanya penerimaan terlambat hingga lewat dari tiga (3) bulan. Jumlah uang tunai yang diterima oleh setiap KPM di Desa Cibeureum terbagi dalam 5 kelompok komponen, yaitu; Anak SD Rp.225.000, SMP Rp.375.000, SMA Rp.500.000, lansia dan disabilitas Rp.600.000, ibu hamil dan balita Rp.750.000. anak SD KPM hanya terhitung satu, walaupun anak SD KPM lebih dari satu, begitu juga dengan SMP dan SMA, kecuali anak balita. Sementara untuk ibu hamil juga dibatasi untuk hamil ketiga tidak akan dihitung lagi hanya berlaku hingga hamil kedua. Menurut hasil wawancara dari sepuluh (10) informan KPM PKH desa Cibeureum, Uang tunai bantuan PKH tersebut dipakai oleh setiap KPM PKH dengan benar sesuai aturan pemerintah, sesuai komponen yang ada dan juga dipakai untuk memenuhi kebutuhan pangan setiap KPM PKH yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara di Desa Cibeureum Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Peneliti melihat bahwa Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat belum optimal dan bahkan masih banyak yang belum tepat sasaran sehingga tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) ini sulit untuk dicapai, jadi hasilnya pun belum sesuai harapan. Meskipun sebagian pemerintah desa dan masyarakat desa mengatakan program ini sudah berjalan dengan baik, bahkan sudah tepat sasaran dan mencapai tujuan namun tanggapan berbeda dari sebagian pemerintah maupun masyarakat penerima dan yang tidak menerima, dimana jawaban mereka saling berbanding terbalik.

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan

Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Cibeureum Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mengacu pada teori S.P. Siagian (Siagian, 2018, p. 77), dimana ada beberapa hal yang diperhatikan antara lain kejelasan tujuan, strategi pencapaian tujuan, Proses Analisis Dan Perumusan Kebijakan, Perencanaan yang matang, penyusunan program, Tersedianya sarana dan prasarana kerja, Pelaksanaan yang efektif dan efisien, Sistem pengawasan dan pengendalian.

Kejelasan Tujuan

Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini ditujukan supaya pemerintah dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.

Berkaitan dengan kejelasan tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Cibeureum maka tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) menurut pengertian pemerintah desa dan masyarakat di desa cibeureum adalah:

Membantu masyarakat yang tidak mampu dalam segala sektor; membina suatu keluarga agar mendapat kehidupan yang lebih layak mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial dan kesejahteraan; membentuk karakter, merubah pola pikir Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk menjadi lebih baik dan mengurangi kemiskinan agar hidup masyarakat lebih sejahtera.

Strategi Pencapaian Tujuan

Kejelasan strategi pencapaian tujuan, bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

Berkaitan dengan strategi pencapaian tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Cibeureum maka strategi yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) menurut pemerintah desa dan masyarakat di desa cibeureum adalah:

Pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat yang benar-benar tidak mampu dan memperbanyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM); pemerintah Saling mendukung dan membangun koordinasi yang baik; membantu masyarakat yang bantuannya tidak bisa cair; memberikan pengetahuan, sumber informasi, koordinasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengerti dan paham tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) agar masyarakat lebih bijak dalam mengelolah dan menggunakan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut Agar tercipta perubahan baik dalam sektor kesehatan maupun kesejahteraan; membangun koordinasi dan komunikasi yang baik antar pemerintah dan pendamping; Pemerintah membentuk Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) di setiap desa, dan ada aplikasi SIKS NG untuk memudahkan pengusulan nama calon penerima dan ada juga pendamping yang di bentuk oleh kemensos; PKH juga kerja sama dengan bank Mandiri agar memudahkan untuk penerimaan bantuan PKH; pemerintah dari pusat/dinas juga menambahkan fitur foto rumah agar kita bisa tahu kelayakan penerimanya; Ada pembelajaran Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), yang dimana disini mereka belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya pengasuhan dan pendidikan anak, kesehatan, pengelolaan keuangan, perlindungan anak, dan kesejahteraan sosial agar mendorong perubahan perilaku masyarakat agar menjadi lebih baik lagi kedepannya dan juga strategi yang digunakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yaitu menggunakan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dengan baik sesuai aturan dari pemerintah, sesuai komponen yang ada dan sesuai kebutuhan dari setiap komponen.

Proses Analisis dan Perumusan Kebijakan

Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, terkait dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

Berkaitan dengan Proses Analisis Dan Perumusan Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Cibeureum maka menurut pemerintah desa dan masyarakat di desa cibeureum adalah:

Bukan pemerintah desa yang menentukan siapa yang berhak menerima tetapi pemerintah pusat lah yang menentukan, pemerintah desa hanya mengusulkan melalui DTKS dan SIKS NG, dengan cara melakukan tanya jawab secara tatap muka menggunakan kuesioner yang diberikan oleh dinas sosial lalu disesuaikan dengan identifikasi di lapangan, untuk nama-nama yang diusulkan harus tetap masuk kedalam kategori yang tidak mampu/ kriteria masyarakat miskin menurut Badan Pusat Statistik (BPS), dan mempunyai komponen seperti ,ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia 60+ da penyandang disabilitas. Untuk anak sekolah harus terdaftar di Dapodik, data harus lengkap dan sinkron dengan data lainnya. Pemerintah Desa Cibeureum dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Menurut masyarakat; pemerintah memfasilitasi ketika bantuan dibagikan di kantor desa, memberikan sosialisasi kepada masyarakat desa bagaimana cara menggunakan uang bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dengan baik, memberikan informasi kepada masyarakat penerima dan membantu masyarakat saat terkendala masalah data.

Perencanaan Yang Matang

Perencanaan yang matang, pada hakikatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.

Berkaitan dengan perencanaan yang matang Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Cibeureum maka perencanaan Program Keluarga Harapan (PKH) menurut pemerintah desa dan masyarakat di desa cibeureum adalah : Program Keluarga Harapan (PKH) ini telah direncanakan oleh pemerintah dengan sebaik mungkin sehingga bisa membantu masyarakat yang membutuhkan di indonesia, program ini sudah lama berjalan namun belum saja mencapai tujuan yang diinginkan, dibalik program pemerintah yang bagus ada proses yang belum berjalan dengan maksimal terutama mengenai sasaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Penyusunan Program

Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

Berkaitan dengan Penyusunan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Cibeureum maka menurut pemerintah desa dan masyarakat di desa cibeureum adalah : Untuk Desa Cibeureum susunan pembagian Program Keluarga Harapan (PKH) sudah sesuai dengan program dan aturan dari pusat karena penerimaan sendiri langsung dari pusat ke ATM Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan dicairkan langsung oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan aturan by name by addres, namun dari pemerintah pusat sendiri kadang nominal uang tunai yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak sesuai dengan komponen yang ada. Tidak ada campur tangan pemerintah desa dalam masalah penetapan hingga pencairan dan penerimaan, pemerintah desa hanya memfasilitasi dan memverifikasi data layak dan yang tidak layak. Program ini dijalankan oleh pemerintah desa sesuai apa yang diinginkan/diharapkan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.

Berkaitan dengan tersedianya sarana dan prasarana kerja di desa Cibeureum menurut pemerintah desa dan masyarakat di desa cibeureum adalah : "Untuk sarana dan prasarana di desa cibeureum sudah bagus bahkan pelayanannya juga bagus dan ramah, masyarakat sudah sangat terbantu dan bahkan belum ada komentar dari masyarakat tentang pelayanan

di desa Cibeureum, tinggal pemerintah desa Cibeureum mempersiapkan untuk lebih bagus kedepannya”.

Pelaksanaan yang Efektif dan Efisien

Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai tujuannya.

Berkaitan dengan pelaksanaan yang efektif dan efisien Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Cibeureum menurut pemerintah desa dan masyarakat di desa cibeureum adalah : Program Keluarga Harapan (PKH) ini dilakukan seefektif dan seefisien mungkin oleh pemerintah sehingga masyarakat telah merasakan manfaatnya yang sangat berguna dan membantu masyarakat, namun penerapannya Belum/kurang efektif dan perlu dimaksimalkan berkaitan dengan sasaran, juga dalam program ini pemerintah desa kurang terlibat dan kurang dilibatkan.

Sistem Pengawasan dan Pengendalian

Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Berkaitan dengan Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Cibeureum maka Sistem Pengawasan Dan Pengendalian di desa Cibeureum menurut pemerintah desa dan masyarakat sebagai berikut :

- a. Untuk pengawasan dan pengendalian dalam pembagian bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) : Ada pengawasan dari pemerintah melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang dibentuk oleh Kemensos Kadang Poskesos atau kesra Juga ikut mengantar warga ketika harus ke kantor pos atau ke dinsos tetapi untuk pengawasan dari pemerintah desa secara khusus tidak ada karena Keluarga Penerima Manfaat (KPM) langsung ke agen untuk penerimaannya, Pemerintah desa hanya mendampingi saat pertemuan awal/validasi karena pelaksanaannya di kantor desa. Jadi yang biasa mendampingi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah pendamping, namun pemerintah desa pernah melakukan sosialisasi, Pemerintah desa memberikan sosialisasi agar uangnya dipakai dengan baik sesuai komponen dan agar uangnya tidak langsung habis pemerintah juga memberikan solusi agar dijadikan usaha agar uangnya terkelola lagi, begitu juga dengan pendamping.
- b. Untuk pengawasan khusus dari pemerintah dalam pemanfaatan uang tunai Program Keluarga Harapan (PKH): Tidak ada pengawasan khusus dari pemerintah tetapi kadang pemerintah desa dan pendamping mengingatkan, memberi arahan dan bahkan setiap bulan ada Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) untuk pembekalan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, Efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Cibeureum Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, belum efektif, dan bahkan banyak yang belum tepat sasaran sehingga tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) belum tercapai secara optimal, namun walaupun begitu program ini sudah berjalan dengan baik oleh pemerintah karena sudah banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH).

Kemudian, Faktor pendukung dan penghambat efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Cibeureum Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat:

- a. faktor pendukung efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu: pemerintah menyediakan aplikasi DTKS dan SIKS NG untuk memudahkan pengusulan nama calon penerima dari setiap desa, adanya operator desa, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dan Puskesmas dalam membantu pengusulan pengawasan dan pendampingan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM), adanya pembelajaran P2K2 dari pendamping untuk semua Keluarga Penerima Manfaat (KPM), jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) cukup banyak, penerimaan bantuan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang sangat mudah dan tidak repot melalui kartu ATM dan di cairkan melalui Agen/ATM terdekat.
- b. faktor penghambat efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) yaitu ; kurangnya komunikasi operator desa dan pendamping PKH dan kurangnya sosialisasi pendamping PKH kepada aparat pemerintah Desa, data terpadu kesejahteraan sosial kurang diperbaharui, kurangnya kerja sama antar Rt/Rw dan operator desa, pemerintah dan opertor desa kurang memprioritaskan masyarakat tidak mampu untuk diusulkan menjadi penerima bantuan, kurangnya informasi operator desa ke masyarakat untuk mengumpulkan data diri/berkas-berkas yang dibutuhkan, data kurang perbaharuan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengumpulkan data diri/berkas-berkas yang dibutuhkan, data masyarakat tidak sinkron, tidak lengkap dan data lama, kurang dilibatkannya pemerintah desa sehingga banyak pemerintah desa yang tidak paham dengan Program Keluarga Harapan (PKH) ini, keterlambatan pencairan, kurangnya pengawasan dalam pemanfaatan uang tunai bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), kurang jelinnya pemerintah pusat dalam menyeleksi calon KPM PKH.

Selanjutnya, Upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Cibeureum Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, pemerintah desa dan pendamping program keluarga harapan (PKH) mengadakan sosialisasi agar uang tunai bantuan program keluarga harapan (PKH) digunakan dengan baik sesuai komponen dan memberikan pelatihan cara berdagang agar uang tunai yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak habis begitu saja Melainkan dikelola agar bisa menambah penghasilan, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) membuat laporan bulanan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar data yang dihasilkan lebih akurat dalam mensurvei, pemerintah dari pusat/dinas sosial menambahkan fitur foto rumah agar kita bisa tahu kelayakannya agar bisa di verifikasi dengan benar, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menggunakan uang tunai bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan baik sesuai komponen.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahardhani, A. J. (2022). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Penerbit Pradina Pustaka.
- Siagian, S. P. (2018). *Manajemen*. Yogyakarta: Liberty.
- Silalahi, U. (2015). *Asas- Asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.